



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Solidaritas Sosial (‘Asabiyyah) dalam Pemikiran Ibnu Khaldun: Studi atas Kemunduran Dinasti Abbasiyah (850–1258 M)

Afifi Takrimi Lubis^{1*}, Kasron Nasution²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, afifitakrimilubis@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, kasron@uinsu.ac.id

*Corresponding Author: afifitakrimi@gmail.com

Abstract: *This study examines the decline of the Abbasid Dynasty during the period 850–1258 AD through the perspective of Ibn Khaldun's thought, particularly the concept of 'asabiyyah as the foundation of social and political solidarity. Using a method of intellectual analysis combined with a historical approach, this study examines Al-Muqaddimah as a primary theoretical source and Tārīkh al-Ṭabarī as a primary historical source, supported by the studies of modern historians. The results of the study show that the luxury of the elite, internal political conflicts, military domination, the crisis of the caliph's legitimacy, and moral and economic collapse gradually weakened 'asabiyyah within the Abbasid Empire. The weakening of social solidarity led to the fragility of the power structure, so that the Mongol invasion in 1258 AD became a factor that accelerated the destruction of the caliphate. These findings confirm the relevance of Ibn Khaldun's thinking in understanding the dynamics of the decline of Islamic civilization.*

Keywords: ‘Asabiyyah, Dinasti Abbasiyah, Ibnu Khaldun

Abstrak: Penelitian ini mengkaji kemunduran Dinasti Abbasiyah pada periode 850–1258 M melalui perspektif pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya konsep ‘asabiyyah sebagai fondasi solidaritas sosial dan politik. Dengan menggunakan metode analisis pemikiran yang dipadukan dengan pendekatan historis, penelitian ini menelaah Al-Muqaddimah sebagai sumber primer teoritis dan Tārīkh al-Ṭabarī sebagai sumber primer historis, serta didukung oleh kajian sejarawan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemewahan elit, konflik politik internal, dominasi militer, krisis legitimasi khalifah, serta keruntuhan moral dan ekonomi secara bertahap melemahkan ‘asabiyyah dalam tubuh Abbasiyah. Melemahnya solidaritas sosial tersebut menyebabkan rapuhnya struktur kekuasaan, sehingga serangan Mongol pada 1258 M menjadi faktor pemercepat kehancuran kekhalifahan. Temuan ini menegaskan relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam memahami dinamika kemunduran peradaban Islam.

Kata Kunci: Asabiyyah, Dinasti Abbasiyah, Ibnu Khaldun

PENDAHULUAN

Kemunduran Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu peristiwa besar yang paling banyak dikaji dalam sejarah peradaban Islam karena menandai berakhirnya sebuah masa keemasan yang sebelumnya didukung oleh kekuatan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang sangat maju (Nurtanti & Wulandari, 2023). Dinasti Abbasiyah yang berdiri sejak tahun 750 M mengalami fase kejayaan terutama pada periode Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun (Irfan, 2016). Namun, memasuki pertengahan abad ke-9 atau sekitar tahun 850 M, tanda-tanda kemunduran mulai tampak, seperti melemahnya otoritas khalifah, konflik internal, dominasi militer, hingga fragmentasi politik ke berbagai wilayah kekuasaan (Ningsih & Arbi, 2025). Perkembangan dan kemunduran Dinasti Abbasiyah ini dicatat secara rinci oleh Imam al-Ṭabarī dalam karyanya *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk*, khususnya pada jilid-jilid yang membahas masa pertengahan hingga akhir Abbasiyah (Al-Tabari, 914). Dalam karya tersebut digambarkan bagaimana intrik politik, konflik kepentingan, pertentangan kelompok, serta ambisi para elite penguasa berkontribusi terhadap melemahnya stabilitas negara. Catatan sejarah al-Ṭabarī menjadi dasar penting dalam memahami dinamika sosial-politik masa itu dan memberikan gambaran mengenai rapuhnya fondasi internal kekhalifahan.

Dalam konteks inilah pemikiran Ibnu Khaldun menjadi sangat relevan, terutama konsep 'asabiyyah yang ia jelaskan secara rinci dalam karya monumentalnya, *Al-Muqaddimah* (Raliby, 1962). Menurut Ibnu Khaldun, kekuatan dan kelangsungan hidup sebuah peradaban sangat bergantung pada solidaritas sosial atau 'asabiyyah yang mengikat masyarakat dalam satu tujuan bersama. 'Asabiyyah yang kuat umumnya muncul pada kelompok masyarakat yang hidup sederhana, berada dalam kondisi yang menuntut kerja sama, serta memiliki ikatan kekerabatan dan solidaritas yang erat (Nurtanti & Wulandari, 2023). Ketika kelompok tersebut memperoleh kekuasaan, mereka mampu membangun pemerintahan yang stabil. Namun, seiring berkembangnya kemakmuran, muncul kemewahan, penyimpangan moral, korupsi, serta konflik internal yang pada akhirnya melemahkan 'asabiyyah. Ketika solidaritas sosial ini melemah, negara akan memasuki fase kemunduran.

Jika pemikiran Ibnu Khaldun digunakan sebagai kerangka konseptual dalam membaca sejarah Dinasti Abbasiyah, maka konsep 'asabiyyah dapat menjadi alat analisis untuk memahami dinamika internal kekhalifahan (Raliby, 1962). Pada masa awal berdirinya, Abbasiyah ditopang oleh solidaritas sosial yang kuat melalui koalisi berbagai kelompok, seperti Arab, Persia, dan mawālī, yang berperan dalam membangun legitimasi politik dan stabilitas pemerintahan. Namun sejak abad ke-9 M, munculnya kelompok-kelompok politik baru, seperti paraamir daerah, pasukan budak Turki, dan dinasti-dinasti semi-otonom, menunjukkan adanya pergeseran loyalitas yang berimplikasi pada melemahnya solidaritas sosial. Dalam kerangka pemikiran Ibnu Khaldun, kondisi tersebut dipahami sebagai salah satu gejala awal kemunduran negara ketika ikatan sosial yang menopang kekuasaan tidak lagi terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, periode 850–1258 M menjadi fase yang penting untuk dikaji guna menelusuri hubungan antara melemahnya 'asabiyyah dan proses kemunduran Dinasti Abbasiyah (Al-Fahmi et al., 2025).

Penggunaan konsep 'asabiyyah sebagai kerangka teori memberikan sudut pandang yang tidak hanya mengandalkan catatan kronologis sejarah, tetapi juga pendekatan sosiologis yang lebih mendalam (Huda, 2008). Pentingnya mengkaji teori Ibnu Khaldun dalam konteks sejarah Islam tidak hanya karena posisinya sebagai sejarawan besar, tetapi juga karena ia menawarkan model penjelasan mengenai naik dan turunnya peradaban yang relevan hingga masa kini (Efendi, 2024). Sejumlah kajian modern, seperti karya Marshall Hodgson, Ira M. Lapidus, dan Bernard Lewis, menunjukkan relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam menjelaskan dinamika sosial-politik masyarakat. Selain itu, berbagai jurnal ilmiah yang membahas teori siklus peradaban Ibnu Khaldun mengindikasikan bahwa gagasan tersebut dapat diterapkan pada beragam kasus sejarah, baik dalam dunia Islam maupun peradaban lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konsep ‘asabiyyah menurut Ibnu Khaldun, baik dari segi pengertian maupun fungsinya dalam membangun dan mempertahankan suatu peradaban. Kedua, bagaimana kondisi sosial-politik Dinasti Abbasiyah pada periode 850–1258 M berdasarkan sumber primer, seperti karya al-Ṭabarī, serta sumber-sumber sekunder yang relevan. Ketiga, bagaimana melemahnya ‘asabiyyah berpengaruh terhadap proses kemunduran Dinasti Abbasiyah dalam kerangka pemikiran Ibnu Khaldun.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada periode 850–1258 M, karena masa tersebut dianggap sebagai fase kritis ketika Dinasti Abbasiyah mulai memasuki era disintegrasi politik dan melemahnya fondasi sosial negara. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam masa kejayaan Abbasiyah sebelum abad ke-9 M, karena fokus kajian diarahkan pada gejala sosial yang berkontribusi terhadap proses kemunduran. Selain itu, penelitian ini mengkaji konsep ‘asabiyyah berdasarkan penafsiran langsung dari Al-Muqaddimah dan tidak membahas seluruh pemikiran Ibnu Khaldun secara menyeluruh agar pembahasan tetap terarah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemunduran Dinasti Abbasiyah pada periode 850–1258 M melalui perspektif pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya konsep ‘asabiyyah sebagai fondasi sosial-politik sebuah peradaban. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi sosial-politik Dinasti Abbasiyah pada periode tersebut berdasarkan sumber-sumber primer klasik, terutama Tarikh al-Rusul wa al-Muluk karya Imam al-Ṭabarī, yang kemudian diperkuat dengan berbagai kajian dari sejarawan modern sebagai sumber sekunder. Tujuan selanjutnya adalah menganalisis hubungan antara melemahnya ‘asabiyyah dengan proses kemunduran Dinasti Abbasiyah dalam kerangka pemikiran Ibnu Khaldun, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor sosial dan struktural yang memengaruhi runtuhnya kekuasaan Abbasiyah.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan sejarah Islam dan historiografi Islam, khususnya dalam penerapan teori sosial Ibnu Khaldun terhadap peristiwa sejarah konkret. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan menghubungkan konsep ‘asabiyyah sebagai teori sosiologis dengan realitas sejarah Dinasti Abbasiyah, sehingga memperkuat posisi Ibnu Khaldun sebagai pelopor sosiologi sejarah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi kajian-kajian selanjutnya yang ingin menggunakan pendekatan pemikiran Ibnu Khaldun dalam menganalisis dinamika peradaban Islam maupun non-Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis pemikiran yang dipadukan dengan pendekatan historis untuk menelaah relevansi konsep ‘asabiyyah Ibnu Khaldun dalam menjelaskan kemunduran Dinasti Abbasiyah pada periode 850–1258 M. Metode analisis pemikiran diterapkan melalui pembacaan kritis dan interpretatif terhadap teks primer Al-Muqaddimah, dengan fokus pada struktur konseptual ‘asabiyyah, fungsi sosial-politisinya, serta mekanisme siklus kekuasaan dan peradaban yang dirumuskan Ibnu Khaldun. Pendekatan ini menekankan analisis tekstual-konseptual guna memahami gagasan filosofis-sosiologis dalam konteks historisnya (Alatas, 2014; Ibnu Khaldun, 1377; Mahdi, 2015).

Pendekatan historis digunakan untuk mengkaji realitas sosial-politik Dinasti Abbasiyah berdasarkan sumber primer klasik, terutama Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk karya Imam al-Ṭabarī (jilid 28–33), serta didukung oleh karya sejarah klasik dan modern. Pendekatan ini berfungsi menghubungkan teori ‘asabiyyah dengan dinamika empiris, seperti fragmentasi kekuasaan, dominasi kelompok militer non-Arab, perebutan pengaruh politik istana, dan melemahnya solidaritas sosial di pusat pemerintahan Baghdad. Dalam kerangka metodologi

sejarah, langkah ini mengikuti prinsip rekonstruksi peristiwa secara kritis melalui sumber primer dan penafsiran kontekstual (Gottschalk, 1953; Kuntowijoyo, 1999).

Tahapan penelitian meliputi: (1) pengumpulan data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan; (2) kritik sumber untuk menilai reliabilitas, otentisitas, dan konteks historis sumber; (3) analisis tekstual-konseptual terhadap ‘asabiyyah dalam *Al-Muqaddimah*; dan (4) komparasi antara kerangka teoretis Ibnu Khaldun dan data sejarah Abbasiyah sebagaimana terekam dalam sumber primer dan dianalisis oleh sejarawan modern. Melalui kombinasi dua pendekatan ini, penelitian menghasilkan pemahaman yang integratif mengenai hubungan antara melemahnya ‘asabiyyah dan kemunduran Abbasiyah, sekaligus mengonfirmasi kesesuaian teori Ibnu Khaldun sebagai alat analisis sejarah Islam (El-Hibri, 2018; Kennedy, 2023; Lapidus, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep ‘Asabiyyah Menurut Ibnu Khaldun

Konsep ‘asabiyyah menempati posisi sentral dalam keseluruhan bangunan pemikiran Ibnu Khaldun dan menjadi fondasi utama dalam teori sosial serta filsafat sejarah yang ia rumuskan dalam *Al-Muqaddimah*. Secara etimologis, ‘asabiyyah merujuk pada ikatan solidaritas, rasa kebersamaan, dan loyalitas kolektif yang mengikat individu-individu dalam suatu kelompok sosial. Namun, Ibnu Khaldun tidak membatasi konsep ini pada hubungan kekerabatan semata, melainkan memahaminya sebagai solidaritas sosial yang lebih luas yang berfungsi sebagai kekuatan penggerak lahirnya kekuasaan dan peradaban (Ibnu Khaldun, 1377; Mahdi, 2015; Matin et al., 2025). Dalam konteks kajian keislaman di Indonesia, konsep ini juga dipahami sebagai fondasi sosiologis negara dan kekuasaan dalam perspektif klasik Islam (Huda, 2008).

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan politik yang dapat berdiri tanpa dukungan ‘asabiyyah. Solidaritas sosial menjadi prasyarat utama bagi terbentuknya kekuatan kolektif yang mampu mengorganisasi masyarakat, mengoordinasikan tindakan bersama, serta memenangkan persaingan politik dengan kelompok lain. Dalam konteks ini, ‘asabiyyah dipahami sebagai energi sosial yang melahirkan otoritas politik dan legitimasi kekuasaan (Ibn Khaldun, 2001; Baali, 1988). Sejumlah penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa solidaritas sosial dalam pemikiran Ibnu Khaldun memiliki relevansi yang kuat dalam menjelaskan dinamika politik Islam klasik maupun kontemporer (Efendi, 2024; Sugari & Hilalludin, 2025).

Dalam masyarakat awal, khususnya masyarakat badui, ‘asabiyyah berada pada tingkat yang sangat kuat. Kehidupan yang keras dan tuntutan untuk bertahan hidup mendorong terciptanya kerja sama serta kohesi sosial yang tinggi. Kondisi ini menjadikan kelompok tersebut memiliki daya juang kolektif yang besar, sehingga mampu merebut dan membangun kekuasaan (Ibnu Khaldun, 1377; Mahdi, 2015). Ketika kelompok dengan ‘asabiyyah kuat berhasil membentuk negara, solidaritas tersebut menjadi basis legitimasi dan stabilitas politik (Huda, 2008; Lapidus, 2014).

Namun, Ibnu Khaldun juga menunjukkan bahwa ‘asabiyyah tidak bersifat permanen. Seiring meningkatnya kemewahan dan stabilitas ekonomi, muncul kecenderungan individualisme, konflik internal elite, dan ketergantungan pada militer bayaran yang memperlemah solidaritas sosial. Gejala ini sering menjadi awal kemunduran politik suatu dinasti (Hodgson, 1974; Ibnu Khaldun, 1377). Dalam konteks Abbasiyah, fragmentasi kekuasaan dan munculnya kekuatan militer non-Arab menjadi contoh konkret melemahnya solidaritas sosial dalam struktur negara (Fikri et al., 2026; Kennedy, 2023). Penelitian historiografi Indonesia juga menegaskan bahwa dinamika sosial-politik Abbasiyah menunjukkan pola disintegrasi internal yang sejalan dengan teori siklus Ibnu Khaldun (Dardiri et al., 2023).

Selain solidaritas sosial, Ibnu Khaldun menempatkan moralitas, agama, dan kepemimpinan sebagai faktor penting dalam memperkuat atau melemahkan ‘asabiyyah. Moralitas berfungsi sebagai pengendali perilaku elite dan masyarakat, sedangkan agama mampu memperluas solidaritas sosial melampaui batas etnis dan kesukuan (Alatas, 2014; Ibnu Khaldun, 1377). Dalam kajian nasional, aspek moralitas penguasa juga dipandang sebagai variabel penting dalam menjaga stabilitas negara, karena kemerosotan moral elite seringkali berujung pada melemahnya legitimasi politik (Zulkarnaen et al., 2025).

Kepemimpinan yang adil dan berintegritas memperkuat kepercayaan publik serta menjaga kohesi sosial, sementara kepemimpinan yang korup dan represif justru mempercepat disintegrasi sosial (Kennedy, 2023; Lewis, 1991). Dengan demikian, melemahnya ‘asabiyyah tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural, tetapi juga dengan dimensi etis dan religius yang menopang kekuasaan.

Puncak pemikiran Ibnu Khaldun tampak dalam teorinya tentang siklus naik dan turunnya peradaban. Ia memandang sejarah sebagai proses yang bersifat siklikal, di mana setiap peradaban akan melalui fase kelahiran, pertumbuhan, kejayaan, kemunduran, dan kehancuran (Efendi, 2024; Mahdi, 2015). ‘Asabiyyah menjadi variabel utama yang menentukan transisi antar fase tersebut. Pada fase awal, solidaritas sosial sangat kuat dan memungkinkan terbentuknya negara yang stabil. Namun pada fase kemewahan, melemahnya solidaritas sosial dan meningkatnya penyimpangan moral menjadi awal kemunduran (Hodgson, 1974; Ibnu Khaldun, 1377).

Tahap akhir adalah kehancuran, ketika ‘asabiyyah hampir sepenuhnya hilang dan negara tidak lagi mampu mempertahankan stabilitas politik maupun sosial. Pada titik ini, kelompok baru dengan solidaritas sosial yang lebih kuat akan menggantikan kekuasaan lama, sehingga siklus sejarah kembali berulang (Efendi, 2024; Lapidus, 2014). Dengan demikian, konsep ‘asabiyyah dalam pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memiliki signifikansi teoritis dalam menjelaskan dinamika kekuasaan dan peradaban, baik dalam konteks klasik maupun kontemporer.

Situasi Sosial-Politik Dinasti Abbasiyah (850–1258 M)

Memasuki pertengahan abad ke-9 M, Dinasti Abbasiyah mulai menunjukkan perubahan mendasar dalam struktur sosial-politik kekhalifahan. Periode sekitar tahun 850 M sering dipandang sebagai titik awal melemahnya otoritas pusat di Baghdad. Pada fase ini, khalifah tidak lagi memegang kendali penuh atas pemerintahan sebagaimana pada masa kejayaan sebelumnya, khususnya pada era Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun. Kekuasaan politik secara bertahap mengalami pergeseran dari otoritas khalifah menuju elite birokrasi dan militer, sehingga peran khalifah semakin bersifat simbolik daripada substantif (Kennedy, 2023; Lapidus, 2014).

Realitas melemahnya otoritas pusat ini terekam jelas dalam sumber primer klasik. Al-Ṭabarī, dalam *Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk*, mencatat bahwa pada masa-masa pertengahan Abbasiyah, kekuasaan khalifah sering kali berada di bawah bayang-bayang para pejabat istana dan panglima militer yang saling berebut pengaruh. Ia menggambarkan kondisi ketika keputusan politik dan pengangkatan khalifah kerap ditentukan oleh kekuatan elite dan militer, bukan oleh otoritas khalifah itu sendiri (Al-Tabari, 914). Catatan ini menunjukkan bahwa krisis Abbasiyah bukan sekadar konstruksi historiografis modern, melainkan kenyataan historis yang disaksikan langsung oleh sejarawan sezaman (Donner, 2021).

Salah satu indikator utama melemahnya pusat kekuasaan Abbasiyah adalah meningkatnya peran wazir dan birokrasi istana. Wazir tidak lagi berfungsi sebagai pelaksana administratif, melainkan menjadi aktor dominan dalam pengambilan kebijakan politik dan ekonomi negara. Pergantian wazir yang cepat akibat intrik politik mencerminkan instabilitas struktural pemerintahan pusat. Kennedy (2022) menafsirkan fenomena ini sebagai bentuk

degradasi institusional dalam sistem kekhalifahan, sementara Lapidus (2014) melihatnya sebagai konsekuensi logis dari kompleksitas administrasi imperium yang terlalu luas. Pandangan ini dilengkapi oleh El-Hibri (2010), yang menekankan bahwa konflik elite Abbasiyah juga dipengaruhi oleh narasi legitimasi politik dan simbolisme kekhalifahan yang terus diperebutkan (El-Hibri, 2018; Kennedy, 2023; Lapidus, 2014).

Selain birokrasi, faktor militer memegang peranan sentral dalam dinamika sosial-politik Abbasiyah. Sejak masa al-Mu'tasim, kekhalifahan semakin bergantung pada pasukan budak Turki sebagai kekuatan militer utama. Ketergantungan ini mengubah keseimbangan kekuasaan secara signifikan, karena militer tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali khalifah. Dalam banyak kasus, militer justru menjadi penentu suksesi kekhalifahan dengan mengangkat dan menjatuhkan khalifah sesuai kepentingan mereka. Hodgson (1974) menyebut fenomena ini sebagai bentuk militerisasi politik, sementara Lapidus (2014) memandangnya sebagai gejala melemahnya kohesi elite sipil dalam struktur negara (Hodgson, 1974; Lapidus, 2014).

Dalam pandangan peneliti, kedua pendekatan tersebut saling melengkapi. Dominasi militer tidak hanya merupakan akibat dari kelemahan institusi administratif, tetapi juga mencerminkan krisis kohesi sosial di kalangan elite Abbasiyah. Ketika solidaritas internal melemah dan kepercayaan antarelite runtuh, kekuasaan cenderung bertumpu pada kekuatan koersif sebagai sarana stabilisasi. Pola ini menunjukkan bahwa kemunduran Abbasiyah berlangsung sebagai proses struktural dan sosial yang saling berkaitan.

Ketidakstabilan di pusat pemerintahan berdampak langsung pada melemahnya kontrol Abbasiyah atas wilayah-wilayah provinsi. Pada abad ke-10 M, Dinasti Buwaihiyah berhasil menguasai Baghdad dan mengendalikan pemerintahan Abbasiyah secara de facto, sementara khalifah dipertahankan sebagai simbol legitimasi religius. Kennedy (2023) melihat dominasi Buwaihiyah sebagai bukti pergeseran kekuasaan riil dari khalifah kepada penguasa regional (Kennedy, 2023). Pola serupa berlanjut pada abad ke-11 M ketika Dinasti Seljuk menggantikan Buwaihiyah. Meskipun Seljuk mengembalikan simbolisme Sunni kepada khalifah, kekuasaan administratif dan militer tetap berada di tangan sultan Seljuk (Hodgson, 1974; Lapidus, 2014).

Fragmentasi politik ini juga terjadi di wilayah lain seperti Mesir, Afrika Utara, dan wilayah timur Islam, di mana muncul dinasti-dinasti independen yang secara nominal masih mengakui khalifah Abbasiyah, tetapi secara praktis menjalankan pemerintahan sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi sosial-politik kekhalifahan telah melemah secara menyeluruh dan kohesi internal negara semakin rapuh.

Dengan demikian, kondisi sosial-politik Dinasti Abbasiyah pada periode 850–1258 M memperlihatkan pola krisis struktural yang berlangsung secara gradual dan sistemik. Melemahnya sentralisasi kekuasaan, dominasi birokrasi dan militer dalam politik, fragmentasi wilayah melalui kemunculan dinasti-dinasti semi-otonom, serta perubahan fungsi khalifah dari penguasa substantif menjadi simbol legitimasi religius menunjukkan terjadinya disintegrasi kohesi sosial-politik negara. Dalam perspektif peneliti, kemunduran Abbasiyah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat serangan eksternal Mongol, melainkan sebagai hasil akumulasi kelemahan internal yang berkembang selama berabad-abad. Kondisi ini sejalan dengan kerangka pemikiran Ibnu Khaldun tentang melemahnya solidaritas sosial ('asabiyyah) sebagai fondasi utama runtuhnya sebuah kekuasaan dan peradaban (Alatas, 2014; Ibnu Khaldun, 1377).

Analisis Melemahnya 'Asabiyyah dalam Tubuh Abbasiyah

Dalam kerangka pemikiran Ibnu Khaldun, kekuatan suatu dinasti sangat bergantung pada 'asabiyyah, yaitu solidaritas sosial yang berfungsi sebagai fondasi legitimasi dan stabilitas kekuasaan. Ketika solidaritas ini melemah, negara akan memasuki fase kemunduran yang bersifat sistemik. Jika kondisi Dinasti Abbasiyah pada periode 850–1258 M dianalisis melalui perspektif ini, tampak bahwa kehancuran yang terjadi bukanlah peristiwa mendadak,

melainkan hasil dari proses panjang pelemahan ‘asabiyyah di dalam tubuh kekhalifahan itu sendiri (Alatas, 2014; Ibnu Khaldun, 1377; Mahdi, 2015).

Salah satu gejala utama melemahnya ‘asabiyyah adalah berkembangnya kemewahan dan gaya hidup elit istana. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa generasi penguasa yang hidup dalam kemakmuran cenderung kehilangan semangat perjuangan dan solidaritas kolektif yang dahulu menjadi kekuatan utama pendiri dinasti. Kemewahan mendorong sikap individualistik, ketergantungan pada kenyamanan, serta menjauhkan elite dari realitas sosial masyarakat luas (Ibnu Khaldun, 1377). Dalam konteks Abbasiyah, istana Baghdad menjadi simbol kemegahan peradaban Islam, namun di saat yang sama mencerminkan meningkatnya pemborosan fiskal dan melemahnya disiplin moral penguasa. Hodgson (1974) dan Lapidus (2014) menegaskan bahwa gaya hidup elit yang berlebihan turut menggerus daya tahan politik dan ekonomi kekhalifahan. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, fase ini menandai awal erosi ‘asabiyyah akibat dominasi kemewahan atas solidaritas (Hodgson, 1974; Lapidus, 2014).

Selain kemewahan elit, konflik politik internal menjadi faktor signifikan yang mempercepat runtuhnya solidaritas sosial. Perebutan kekuasaan antarelite, intrik istana, dan keterlibatan militer dalam suksesi khalifah menunjukkan bahwa kepentingan kelompok sempit semakin mengalahkan kepentingan kolektif negara. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa ketika loyalitas terfragmentasi dan solidaritas tidak lagi terpusat pada otoritas bersama, maka ‘asabiyyah akan terpecah dan kehilangan daya integratifnya (Ibnu Khaldun, 1377). Kondisi ini tercermin dalam sejarah Abbasiyah pada abad ke-10 hingga ke-12 M, sebagaimana dicatat oleh al-Ṭabarī dan dianalisis oleh Kennedy (2023) serta Lapidus (2014). Fragmentasi tersebut tidak hanya bersifat politik, tetapi juga sosial, karena hubungan antara penguasa dan masyarakat semakin renggang dan diliputi krisis kepercayaan (Kennedy, 2023; Lapidus, 2014).

Menurunnya legitimasi khalifah merupakan konsekuensi langsung dari melemahnya ‘asabiyyah. Pada masa awal Abbasiyah, khalifah berfungsi sebagai pemimpin religius sekaligus politik yang menjadi pusat loyalitas umat. Namun, pada periode kemunduran, kekuasaan riil berpindah ke tangan penguasa militer dan dinasti regional seperti Buwaihiyah dan Seljuk, sementara khalifah direduksi menjadi simbol keagamaan. Dalam teori Ibnu Khaldun, kondisi ini menunjukkan hilangnya figur pemimpin sebagai titik temu solidaritas sosial, sehingga legitimasi kekuasaan menjadi rapuh (Alatas, 2014). El-Hibri (2018) menambahkan bahwa krisis legitimasi Abbasiyah juga dipengaruhi oleh narasi politik yang saling bersaing dalam memaknai otoritas khalifah, yang semakin memperlemah kohesi internal kekhalifahan (El-Hibri, 2018).

Aspek lain yang mempercepat kemunduran ‘asabiyyah adalah keruntuhan moral dan ekonomi. Ibnu Khaldun menekankan bahwa ketidakadilan fiskal, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap negara dan melemahkan solidaritas sosial (Ibnu Khaldun, 1377). Pada fase akhir Abbasiyah, meningkatnya beban pajak, lemahnya administrasi, serta tingginya pengeluaran militer menyebabkan struktur ekonomi negara semakin rapuh. Lapidus (2014) dan Donner (1998) mencatat bahwa krisis ekonomi dan administrasi tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga mempercepat disintegrasi sosial, karena negara gagal menjalankan fungsi perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Donner, 2021; Lapidus, 2014).

Akumulasi dari kemewahan elit, konflik internal, krisis legitimasi, serta keruntuhan moral dan ekonomi akhirnya mencapai titik kritis pada tahun 1258 M, ketika pasukan Mongol di bawah Hulagu Khan menghancurkan Baghdad. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, serangan eksternal seperti invasi Mongol bukanlah penyebab utama runtuhnya sebuah negara, melainkan faktor pemercepat kehancuran struktur yang telah lama rapuh dari dalam. Negara yang masih memiliki ‘asabiyyah kuat akan mampu bertahan menghadapi tekanan luar, tetapi ketika solidaritas sosial telah runtuh, maka intervensi eksternal menjadi penentu akhir kehancuran (Ibnu Khaldun, 1377; Mahdi, 2015).

Dengan demikian, kemunduran Dinasti Abbasiyah pada periode 850–1258 M dapat dipahami sebagai konsekuensi langsung dari melemahnya ‘asabiyyah dalam tubuh kekhalifahan. Kemewahan elit mengikis solidaritas, konflik politik memecah loyalitas, legitimasi khalifah menurun, serta krisis moral dan ekonomi melemahkan fondasi negara. Dalam posisi peneliti, kerangka teoritis Ibnu Khaldun terbukti memberikan penjelasan yang komprehensif dan sistemik terhadap dinamika tersebut, karena mampu mengintegrasikan faktor sosial, politik, moral, dan ekonomi dalam satu model analitis yang koheren. Oleh sebab itu, kehancuran Abbasiyah bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan ilustrasi konkret dari siklus peradaban sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu Khaldun.

KESIMPULAN

Kemunduran Dinasti Abbasiyah pada periode 850–1258 M tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat serangan eksternal Mongol, melainkan sebagai hasil dari proses panjang melemahnya solidaritas sosial (‘asabiyyah) dalam tubuh kekhalifahan. Melalui analisis pemikiran Ibnu Khaldun dalam *Al-Muqaddimah* dan telaah historis terhadap sumber primer seperti *Tārīkh al-Ṭabarī*, penelitian ini menunjukkan bahwa kemewahan elit, konflik politik internal, dominasi militer, krisis legitimasi khalifah, serta keruntuhan moral dan ekonomi secara gradual mengikis fondasi sosial-politik Abbasiyah. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, melemahnya ‘asabiyyah menyebabkan hilangnya kohesi kolektif yang sebelumnya menjadi kekuatan utama dinasti. Serangan Mongol tahun 1258 M dengan demikian merupakan faktor pemercepat runtuhnya struktur yang telah rapuh dari dalam. Temuan ini menegaskan relevansi teori Ibnu Khaldun sebagai kerangka analitis yang komprehensif dalam memahami dinamika naik-turunnya peradaban Islam secara historis dan sosiologis.

REFERENSI

- Alatas, S. F. (2014). *Applying Ibn Khaldūn*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203093597>
- Al-Fahmi, F. F., Fadhillah, A., Pujiastuti, R., Pauji, A., & Purnama, M. P. (2025). Sejarah Keemasan Islam: Dinasti Abbasiyah dan Kontribusinya. *Maulana Atsani: Jurnal Pendidikan Multidisipliner*, 1(3), 124–134. <https://doi.org/10.51806/30CEVQ06>
- Al-Tabari, M. ibn J. (914). *History of al-Ṭabarī*. <https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/history-al-tabari>
- Dardiri, M. A., Waluyo, W., & Aquil, A. (2023). Kondisi Sosial-Politik Dinasti Abbasiyah dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 24(1), 69–82. <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.318>
- Donner, F. M. (2021). *Narratives of Islamic Origins*. Gerlach Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1b9f5gk>
- Efendi, Z. (2024). Ibnu Khaldun dan Teori Peradaban: Relevansi Pemikirannya dalam Dunia Modern. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 2198–2210. <https://doi.org/10.31004/INNOVATIVE.V4I6.16620>
- El-Hibri, T. (2018). *Parable and Politics in Early Islamic History: the Rashidun Caliphs*. Columbia University Press.
- Fikri, S., Bisri, A. M., & Rahmawati, S. (2026). Ketika Baghdad Bersinar: Masa Emas dan Akhir Dinasti Abbasiyah 750-1258 M. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 34–44. <https://doi.org/10.54065/BaytAl-Hikmah.597>
- Gottschalk, L. R. (1953). Understanding History, A Primer of Historical Method. *Nursing Research*, 2(1), 44. <https://doi.org/10.1097/00006199-195306000-00021>
- Hodgson, M. G. S. (1974). *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization* (Vol. 3). The University of Chicago Press.

- Huda, N. (2008). Pemikiran Ibn Khaldun tentang Ashabiyah. *Jurnal Suhuf*, 20(1).
- Ibnu Khaldun. (1377). *Muqaddimah*.
- Irfan. (2016). Peranan Baitul Hikmah dalam Menghantarkan Kejayaan Daulah Abbasiyah. *Jurnal As-Salam*, 1(2), 139–155. <https://www.neliti.com/publications/293622/>
- Kennedy, Hugh. (2023). *The Prophet and the Age of the Caliphates : the Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Kuntowijoyo. (1999). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yayasan Bentang Budaya.
- Lapidus, I. M. (2014). *A history of Islamic Societies*. Cambridge University Press.
- Lewis, B. (1991). *The Political Language of Islam*. University of Chicago Press.
- Mahdi, M. (2015). *Ibn Khaldūn's Philosophy of History*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315670188>
- Matin, Masykur, & Gufron, I. A. (2025). Kritik Ibn Khaldun terhadap Budaya dan Kekuasaan: Analisis Konsep Ashabiyyah' dalam Muqaddimah. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1043–1049. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1179>
- Ningsih, Y. S., & Arbi. (2025). Kondisi Peradaban dalam Perkembangan Intelektual pada Masa Disintegrasi Dinasti Abbasiyah (Kemunduran Dan Kebangkitan: Peradaban Intelektual di Era Disintegrasi Abbasiyah). *Inovasi Pendidikan Nusantara*, 6(2), 338–347. <https://ejournals.com/ojs/index.php/ipn/article/view/1739>
- Nurtanti, A., & Wulandari, N. D. (2023). Masa The Golden Age dan Kemunduran Dinasti Abbasiyah. *Jambura History and Culture Journal*, 5(1), 70–81. <https://doi.org/10.37905/jhcj.v5i2.20702>
- Raliby, O. (1962). *Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*. Bulan Bintang.
- Sugari, D., & Hilalludin, H. (2025). Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Peradaban Islam dan Relevansinya bagi Masyarakat Modern. *Imanu: Jurnal Hukum Dan Peradaban Islam*, 1(03), 01–15. <https://www.risetcendikia.com/index.php/jurnal-imanu/article/view/12>
- Zulkarnaen, R. A., Fitriyanti, R., & Azmi, A. N. (2025). Kekuasaan dan Siklus Negara: Analisis Pemikiran Politik 'Ashabiyyah Ibnu Khaldun. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 119–128. <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v3i2.33>